

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI TERPADU DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

Alfa Reza Triananda

NPP. 29.0764

Asal Pendaftaran Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Kebijakan Publik

Email : Alfa12strike@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Batang Regency is one of the regency / cities of Central Java that have strategic area of the three main line of economic mobilizations in Java Island. However, in reality, the economy in Batang Regency is still low where the original income is 29th, and the Gross Regional Domestic Product (GRDP) is ranked 27th out of a total of 35 regencies / cities in Central Java. Furthermore, the existence of the Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) is expected to help revitalize the Batang Regency's regional economy if properly managed. Purpose:* *This research have purpose to understand the implementation of KITB management policies and analyze the driving and inhibiting factors, and to formulate strategies that can be used by the Batang Regency Government to improve the economy. regional economy through the management of KITB. Method:* *This study uses qualitative descriptive research method. The analytical tool used is the theory of implementation according to Edward III. The data sources for this study are primary and secondary data sources. The data collection techniques used included interviews, observations, and documentation. The data analysis techniques used are Miles and Huberman data analysis techniques and SWOT matrix to analyze strategies to improve regional economy through integrated industrial park management. Result:* *The results of this study explained that based on the results of analysis according to Edward III found that Policy Implementation has been going well, but not optimally because there is still a lack of ability of the government apparatus in English communication and also the lack of authority of the Batang Regency Regional Government because KITB is a National Strategic Project. As for the strategy of the results of the SWOT analysis, among others, the Government needs to develop buffer areas around the KITB location, the Government needs to make regulations related to the use of local labor and restrictions on labor from outside the region. Conclusion :* *The implementation of the Batang Integrated Industrial Estate (KITB) management policy carried out by the Batang Regency Government has been going well, but is not yet optimal because there are still several things that need to be improved. This is because communication with investors is still hampered due to the lack of English language skills of government officials in the Batang Regency Government and also related to the dimensions of the Bureaucratic Structure regarding the authority of the Batang Regency Government is still minimal because this is a Progress Strategic Project, so it is mostly held by the center so that the Government Batang Regency is not able to fully manage it because of limited authority.*

Keywords: *Policy Implementation, Strategy, KITB, management, National Strategic Projects*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki letak strategis di 3 jalur utama mobilisasi perekonomian di Pulau Jawa. Namun, pada kenyataannya perekonomian di Kabupaten Batang masih rendah di mana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang menempati peringkat 29 serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menempati peringkat 27 dari total 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selanjutnya, kehadiran Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) diharapkan akan mampu membantu membangkitkan perekonomian daerah Kabupaten Batang jika mampu dikelola dengan baik. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan KITB dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat serta untuk merumuskan strategi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan KITB. **Metode :** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Alat analisis yang digunakan adalah Teori Implementasi menurut Edward III. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data Miles dan Huberman serta matriks SWOT untuk menganalisis strategi peningkatan perekonomian daerah melalui pengelolaan Kawasan Industri Terpadu. **Hasil/Temuan :** Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis menurut teori implementasi Edward III ditemukan bahwa Implementasi Kebijakan telah berjalan dengan baik, akan tetapi belum optimal dikarenakan masih kurangnya kemampuan aparatur pemerintah dalam komunikasi bahasa Inggris dan juga masih minimnya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dikarenakan KITB ini merupakan Proyek Strategis Nasional. Adapun strategi hasil dari analisis SWOT, antara lain Pemerintah perlu mengembangkan kawasan penyangga di sekitar lokasi KITB, Pemerintah perlu membuat peraturan terkait penggunaan tenaga kerja lokal dan pembatasan tenaga kerja dari luar daerah. **Kesimpulan :** Implementasi kebijakan pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Batang telah berjalan dengan baik, akan tetapi belum optimal dikarenakan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Hal ini dikarenakan komunikasi dengan investor yang masih terhambat disebabkan kurangnya kemampuan berbahasa Inggris para aparatur pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dan juga berkaitan dimensi Struktur Birokrasi tentang kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Batang masih minim dikarenakan ini Proyek Strategis Nasional maka lebih banyak dipegang oleh pusat sehingga Pemerintah Kabupaten Batang kurang dapat mengelola secara penuh karena kewenangan terbatas.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan; Strategi; KITB; pengelolaan, Proyek Strategis Nasional.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu fungsi dasar yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menjadi pemacu pembangunan di wilayahnya, di mana pembangunan ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat baik secara fisik maupun secara non fisik guna melancarkan kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan hakekatnya merupakan suatu upaya dalam mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang mandiri, berkeadilan, maju, sejahtera, berdasarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakekat pembangunan nasional sendiri bertujuan mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu : mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Pembangunan menjadi sektor yang perlu diperhatikan di setiap era pemerintahan karena dengan pembangunan membuat sarana prasarana yang menjadi penunjang kehidupan masyarakat menjadi terpenuhi. Oleh karena itu, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan lebih dititikberatkan pada pembangunan fisik berupa infrastruktur¹. Hal ini dimaksudkan agar ada pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia di mana tujuan akhirnya adalah untuk memudahkan mobilisasi masyarakat maupun mobilisasi sektor-sektor yang menopang perekonomian Indonesia.

Salah satu bidang infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah saat ini adalah infrastruktur industri. Pembangunan infrastruktur industri bertujuan untuk menarik investasi dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini tidak bisa dipungkiri, Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan investasi dari perusahaan-perusahaan guna memutar roda perekonomian di Indonesia.

Menjawab kebutuhan infrastruktur khususnya lokasi industri bagi investor, pemerintah telah mengatur suatu wilayah untuk menampung berbagai kegiatan industri melalui pembangunan kawasan industri. Kebijakan pemerintah tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.

Salah satu kawasan industri yang merupakan bagian Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) memiliki luas 4.300 Hektare yang terletak di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah². Proyek ini diprakarsai Pemerintah Pusat dengan tujuan memanfaatkan momentum untuk menangkap peluang investasi asing. Hingga saat ini, pembangunan KITB terus dipercepat agar dapat beroperasi secara penuh pada tahun 2023. Tentunya pembangunan KITB ini membuka peluang yang lebih besar untuk membuka investasi di wilayah Kabupaten Batang.

Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) ini menjadi salah satu harapan baru untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Batang. Di mana dari adanya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) ini akan muncul investor-investor baru yang mendirikan perusahaannya disana yang tentunya juga akan membutuhkan banyak tenaga kerja baru sehingga dapat membuka lapangan kerja baru³. Pada saat ini saja, telah ada 4 tenant mancanegara yang berinvestasi di KITB salah satunya yaitu KCC *Glass Corporation* dari Korea Selatan yang merupakan

¹<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/173617165/pidato-presiden-jokowi-sampaikan-5-program-kerja-utamanya-di-masa-mendatang?page=all> (edisi 20 Oktober 2019) diakses pada 25 Agustus 2021 pukul 12.55

² <https://www.antaranews.com/berita/2000633/pembangunan-kawasan-industri-terpadu-batang-terus-dikebut> (edisi 15 Februari 2021) diakses pada 25 Agustus 2021 pukul 13.00 WIT.

³ <https://ptpnix.co.id/presiden-tinjau-kawasan-industri-terpadu-batang/> (edisi 21 April 2021) diakses pada 25 Agustus 2021 pukul 13.00 WIT

produsen kaca terbesar di Asia Tenggara⁴. Selain itu, dalam pembangunannya saja juga telah membawa dampak bagi masyarakat sekitar dan juga nantinya banyak infrastruktur-infrastruktur penunjang yang akan dibangun yang dapat mempermudah aksesibilitas bagi para pekerja yang kemudian juga dapat diakses oleh masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang ada di Kabupaten Batang saat ini yaitu yang pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang yang termasuk dalam 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang paling rendah pemasukannya di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020. Hal ini tertera pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Daftar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Pendapatan (Ribu Rupiah)	No	Kabupaten/Kota	Pendapatan (Ribu Rupiah)
1	2	3	1	2	3
1	Kota Semarang	5.319.832.790	19	Sukoharjo	2.401.529.962
2	Banyumas	3.773.568.764	20	Demak	2.400.405.766
3	Brebes	3.293.494.179	21	Jepara	2.399.062.011
4	Cilacap	3.219.631.963	22	Karanganyar	2.346.436.745
5	Kebumen	3.044.056.768	23	Banjarnegara	2.259.878.404
6	Pati	2.910.220.672	24	Purbalingga	2.104.113.319
7	Klaten	2.907.327.298	25	Wonosobo	2.070.280.635
8	Tegal	2.905.805.253	26	Rembang	2.054.302.198
9	Pemalang	2.836.842.885	27	Blora	2.012.812.302
10	Magelang	2.719.200.678	28	Temanggung	1.996.489.275
11	Grobogan	2.680.645.523	29	Batang	1.925.617.426
12	Purworejo	2.483.287.920	30	Kudus	1.911.471.464
13	Boyolali	2.480.627.139	31	Kota Surakarta	1.624.395.242
14	Wonogiri	2.477.910.262	32	Kota Tegal	1.298.031.100
15	Semarang	2.457.006.194	33	Kota Pekalongan	1.060.107.482
16	Kendal	2.451.834.514	34	Kota Magelang	1.006.107.354
17	Pekalongan	2.446.656.142	35	Kota Salatiga	1.006.404.906
18	Sragen	2.422.886.893			

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah,2022

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang pada tahun 2020 menempati peringkat 29 dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah dan berada satu tingkat di bawah Kabupaten Temanggung. Padahal seyogyanya dengan luas wilayah dan letak geografisnya yang terletak di sepanjang jalan Pantura (Pantai Utara) yang merupakan akses utama mobilisasi masyarakat di Jawa ditambah dengan hadirnya PLTU Batang yang tentunya sudah seharusnya dapat memberikan kontribusi yang cukup besar pada pendapatan asli daerah Batang sehingga bisa lebih bersaing dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah.

Salah satu indikator dalam pertumbuhan ekonomi daerah selain dilihat dari Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) juga dilihat dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Jika dilihat pada tahun

⁴ <https://industri.kontan.co.id/news/nilai-investasi-4-tenan-mancanegara-di-proyek-kit-batang-capai-rp-40-triliun> (edisi 31 Mei 2021) diakses pada 27 Agustus 2021 Pukul 20.00 WIT

2020, PDRB yang dimiliki oleh Kabupaten Batang berada di urutan bawah peringkat 10 besar PDRB terendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Jawa Tengah. Seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Daftar Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	PDRB (Juta Rupiah)	No	Kabupaten/Kota	PDRB (Juta Rupiah)
1	2	3	1	2	3
1	Kota Semarang	140.209.392,66	19	Kebumen	19.815.062,62
2	Cilacap	100.328.438,75	20	Grobogan	19.692.631,32
3	Kudus	73.249.694,10	21	Demak	18.417.009,99
4	Banyumas	39.779.320,86	22	Blora	18.318.415,14
5	Semarang	35.639.310,84	23	Pemalang	18.267.199,78
6	Surakarta	35.442.856,07	24	Purbalingga	17.387.941,84
7	Brebes	32.835.670,72	25	Pekalongan	16.356.350,99
8	Kendal	30.916.386,47	26	Banjarnegara	15.246.865,65
9	Pati	30.900.203,93	27	Batang	15.226.885,02
10	Klaten	27.811.509,49	28	Temanggung	15.214.058,87
11	Sukoharjo	27.076.442,63	29	Wonosobo	13.798.836,28
12	Sragen	26.853.059,12	30	Rembang	13.612.335,31
13	Karanganyar	26.641.186,38	31	Purworejo	13.353.574,19
14	Tegal	24.866.727,91	32	Kota Tegal	11.205.322,88
15	Magelang	23.253.154,32	33	Kota Salatiga	9.666.004,65
16	Boyolali	22.681.097,81	34	Kota Pekalongan	7.477.425,04
17	Jepara	21.384.282,93	35	Kota Magelang	6.472.539,51
18	Wonogiri	20.856.209,49			

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dilihat dari tabel di atas, peringkat PDRB Kabupaten Batang tahun 2020 menempati peringkat 27 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Batang masih tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Jawa tengah yang menunjukkan juga perekonomian daerah Kabupaten Batang juga rendah. Ditambah pada tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19 yang menyebabkan PDRB Kabupaten Batang tahun 2020 turun sebesar Rp. 196.305.020.000 jika dibandingkan dengan tahun 2019.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang dimiliki oleh Kabupaten Batang didominasi sektor industri khususnya industri pengolahan mempunyai peranan penting dalam menentukan PDRB. Pada tahun 2020, peranan industri pengolahan ini mencapai 34,43 persen, yang merupakan penyumbang paling besar dari PDRB. Namun, pada tahun 2020, peran industri pengolahan ini mengalami penurunan sebesar 0,08 persen⁵.

Selain itu, permasalahan yang ada di Kabupaten Batang yaitu jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi di Kabupaten Batang. Seperti tertera pada tabel berikut:

Tabel 1.3

⁵ Mustofa, *Produk Domestik Bruto Kabupaten Batang Menurut Lapangan Usaha 2015-2019* (Batang: Badan Pusat Statistika Kabupaten Batang, 2020).

**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Batang
Tahun 2016-2020**

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Batang	82,56	81,50	66,08	64,07	70,57

Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Batang,2016-2020

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Batang masih cukup besar, di mana penduduk miskin batang mencapai 70.570 jiwa pada tahun 2020. Selain itu, pada tahun 2020 juga terjadi peningkatan angka kemiskinan yang di mana angka kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 6.500 jiwa dalam satu tahun.

Permasalahan yang selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan tingkat angka pengangguran terbuka di Kabupaten Batang yang masih cukup tinggi. Hal ini tertera pada tabel berikut :

**Tabel 1.4
Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Batang
Tahun 2016-2020**

Wilayah	Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka(Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Batang	4,56	5,82	4,23	4,16	6,92

Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Batang,2016-2020

Dari Tabel di atas, tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Batang masih cukup besar, di mana tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Batang mencapai 6,92% pada tahun 2020. Selain itu, pada tahun 2020 juga terjadi peningkatan angka pengangguran terbuka yang di mana angka pengangguran terbuka mencapai 2,76%. Tentunya ini menjadi suatu masalah yang cukup serius bagi Kabupaten Batang.

Berdasarkan adanya fakta temuan permasalahan di lapangan yang menunjukkan bahwa masih tingginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka serta Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah di Kabupaten Batang. Ditambah dengan fakta lain bahwa di Kabupaten Batang sedang ada pembangunan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang diharapkan akan menarik banyak investor besar dan diharapkan akan menjadi kawasan ekonomi baru yang ada di Indonesia. Peneliti tertari melakukan penelitian dengan alasan agar Kabupaten Batang dapat memperoleh kebermanfaatn dari adanya pembangunan KITB dan tidak hanya dijadikan sebagai lokasi pembangunan saja tanpa memperoleh keuntungan serta diharapkan dengan adanya KITB ini permasalahan mengenai tingginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di Kabupaten Batang dapat segera berkurang dengan signifikan dan juga nantinya dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang.

Peraturan yang berkaitan dengan adanya pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang sendiri berawal dari Pemerintah Pusat menetapkan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan dari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Batang membuat peraturan sebagai jawaban atas adanya penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan mengeluarkan Peraturan

Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha untuk Melaksanakan Pengelolaan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang. Untuk memperoleh kebermanfaatannya yang maksimal dari pembangunan KITB terhadap perekonomian Kabupaten Batang, tentunya diperlukan implementasi kebijakan secara baik yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan KITB yang dapat membuat kerugian bagi Kabupaten Batang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mempunyai topik serupa dengan penelitian penulis antara lain penelitian Justiar Noer, dkk pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tukak Sadai Di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”⁶. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tukak Sadai di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga berbagai faktor yang mempengaruhinya. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan yang diterapkan belum optimal dikarenakan ada beberapa faktor penghambat yaitu faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi. Teori Implementasi yang digunakan yaitu Teori dari Grindle.

Penelitian Santi Endah Lestari, dkk. tahun 2018 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Kabupaten Pacitan”⁷. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil kebijakan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Kabupaten Pacitan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teori yang digunakan yaitu model implementasi Grindle. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dari Miles Huberman dan Saldana. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) telah berhasil dengan membawa dampak positif kepada pengembangan kawasan cepat tumbuh yang ada di selatan. Sedangkan, di daerah agropolitan belum dilaksanakan sehingga belum memberikan dampak terhadap kawasan tersebut.

Penelitian Syahrudin pada tahun 2010 yang berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri”⁸. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara yang mendalam terhadap pejabat terkait. Teori yang digunakan merupakan teori implementasi Edward III. Hasil dari penelitian ini menunjukkan belum terjalinnnya komunikasi yang efektif antar lembaga berwenang dan masih rendahnya sumberdaya manusia maupun infrastruktur untuk melaksanakan kebijakan di kawasan industri. Selain itu, pengembangan kawasan Industri belum menjadi fokus pengembangan oleh pemerintah daerah setempat.

⁶ Justiar Noer et al., “Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tukak Sadai” *Jurnal Papatung*: Vol 2, no. 3 (2019): 190–202.

⁷ Santi Endah Lestari, Agus Suryono, and Tjahjanulin Domai, “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Ksct) Di Kabupaten Pacitan,” *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 2, no. 1 (2018): 10.

⁸ Syahrudin, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri,” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 17, no. 1 (2010): 31–42.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang akan peneliti buat memiliki perbedaan yang mendasar dengan berbagai penelitian sebelumnya yaitu berkaitan fokus penelitian. Di mana penelitian ini berfokus Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang mana KITB ini merupakan proyek baru yang mulai dibangun tahun 2020 sehingga penelitian yang akan peneliti lakukan ini memiliki kebaruan dan kekhususan tersendiri dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini perlu dilakukan agar dapat menggali potensi serta mempersiapkan strategi yang sesuai agar KITB ini dapat berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Batang..

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).
3. Untuk merumuskan strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih guna mencari tahu fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan secara nyata sesuai dengan keadaan yang ada di lokasi penelitian yang selanjutnya akan dijelaskan secara terperinci pada tulisan ini. Dengan demikian diharapkan dalam penelitian ini diperoleh hasil dari gambaran di lapangan terkait implementasi kebijakan pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang.

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan didukung dengan sumber data sekunder di mana sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan terkait. Sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi dari dinas terkait serta observasi secara langsung yang dilakukan oleh Peneliti.

Selanjutnya, data yang telah diperoleh di lapangan dianalisis menggunakan alat analisis berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yang terdiri atas 4 dimensi, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) ditinjau melalui teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III. Kebijakan pengelolaan Kawasan Industri Terpadu (KITB) ini bertujuan dalam rangka percepatan pembangunan KITB serta pengelolaannya ke depannya. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan pisau analisis yang dikemukakan oleh Edward III yang terdiri dari 4 dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3.1. Implementasi Kebijakan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dengan cara melakukan observasi secara langsung, wawancara dengan narasumber dan juga dokumentasi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada diperoleh hasil sebagai berikut :

A. Komunikasi

Keberhasilan suatu tujuan dapat tercapai dengan adanya komunikasi yang baik. Komunikasi menjadi faktor penting dikarenakan komunikasi merupakan metode penerjemahan aturan yang ada menjadi sebuah informasi oleh pimpinan, yang kemudian informasi tersebut disampaikan kepada bawahannya ataupun pelaksana untuk segera dilaksanakan sesuai dengan yang tertera pada aturan guna mencapai tujuan. Jika terjadi kesalahan penerjemahan aturan maupun kesalahan penyampaian kepada bawahan/pelaksana, maka tujuan yang telah ditulis tidak dapat tercapai dengan baik.

Dalam komunikasi, media informasi menjadi sebuah alat yang penting dalam penyampaian pesan, Terlebih pada zaman digitalisasi seperti sekarang ini, media informasi merupakan garda terdepan dalam upaya penyampaian informasi baik kepada masyarakat maupun kepada sesama aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Begitu juga dalam proses pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang ini, media informasi elektronik lah yang menjadi penentu keberhasilan komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun dengan investor mengingat pada tahun 2020 hingga saat ini, dunia masih dalam masa pandemi *Covid-19* sehingga pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara langsung sangat dibatasi dan lebih banyak melakukan pertemuan secara daring via zoom.

Sementara itu, terkait dengan media informasi yang memberikan informasi kepada masyarakat dan untuk menarik para investor, pengelola KITB membuat sebuah website dan juga instagram yang berisikan informasi terkait perkembangan dan masterplan Kawasan Industri Terpadu Batang di mana website tersebut memiliki alamat <https://www.grandbatangcity.co.id/> dan untuk instagram sendiri memiliki nama @Grandbatangcity.

Selanjutnya, Koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan pihak konsorsium dengan Pemerintah Kabupaten Batang juga terjalin dengan baik pada saat proses pembangunan dan penarikan investor. Pemerintah Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selaku *Leading Sector* dalam penarikan investasi perusahaan-perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Begitu juga dengan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Penentuan dan penarikan perusahaan-perusahaan asing yang akan berinvestasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) menjadi tanggung jawab dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam hal komunikasi terhadap investor, BKPM menjadi garda terdepan dalam penarikan investor yang datang dari luar negeri. Setelah investor mencapai kesepakatan untuk menanamkan investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), BKPM menghubungi Pemerintah Kabupaten Batang untuk mengurus segala perizinan yang ada dalam mendirikan sebuah perusahaan. BKPM juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Batang dalam hal investor yang akan berkunjung ke lokasi Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) guna menyambut investor di lokasi secara langsung. proses perizinan Kawasan Industri Terpadu Batang berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Suksesnya proses perizinan yang ada itu juga didukung kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Batang. Hal ini dapat dilihat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Batang sering melakukan minimal 1 kali dalam sebulan baik melalui daring maupun luring. Namun, lebih banyak diadakan secara daring dikarenakan masih dalam masa pandemi *Covid-19*.

Pemerintah Kabupaten Batang sendiri juga rutin melakukan koordinasi antar jajaran instansi terkait 2 kali dalam sebulan untuk membahas Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) mengingat Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) ini menjadi harapan besar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang sehingga perlu disiapkan secara baik dan terencana. Selain itu, untuk mempercepat proses perizinan Pemerintah Kabupaten Batang juga membentuk tim verifikasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 751/384/2020 tentang Tim Pemeriksaan Lapangan Kawasan Industri Kabupaten Batang yang bertugas ketika perizinan yang diajukan oleh pihak pengelola

maupun investor kepada BKPM telah selesai, tim ini menjalankan tugas dengan cara memastikan kesesuaian data yang diajukan dengan data yang ada di lapangan secara langsung. Tim ini berkoordinasi secara langsung dengan BKPM. Tim ini terdiri dari :

- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Batang.
- b. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.
- c. Dinas Pekerjaan Umum.
- d. Badan Pertanahan Nasional.
- e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang.
- f. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Komunikasi dengan Investor, sejauh ini berjalan dengan baik hal itu terbukti hingga saat ini telah ada 5 investor yang telah setuju untuk mendirikan perusahaannya di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Kelima investor tersebut yaitu KCC *Glass Corporation* dari Korea Selatan, LG Chem dari Korea Selatan, *Alpan Lighting Product* dari Amerika, Wavin dari Belanda dan PT Astra Otoparts dari Indonesia. Status komunikasi antara pemerintah dengan investor-investor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Daftar Nama Perusahaan yang Akan Berinvestasi Di KITB

NO	Perusahaan	Bidang Usaha	Phone	e-mail	negara	Status
1	KCC Corporation	Kaca	+821032490898	wjpark@kccworl.co.kr	Korea Selatan	MOU BKPM, Meeting KITB
2	LG Chem	Baterai	+6281310048307	theopita@bkpm.co.id	Korea Selatan	MOU BKPM
3	Wavin	Pipa	+6281310048307	theopita@bkpm.co.id	Belanda	MOU BKPM
4	Alpan Lighting Product	Lampu	+8053838886	danny@alpan.com	Amerika	Survey & Meeting KITB-BKPM
5	PT. Astra Otoparts Tbk	Automotive Parts	+6281513493058	Nipponent.astra.co.id	Indonesia	Product Knowledge

Sumber : IPW BAPPELITBANG Kabupaten Batang, 2021

Masuknya investor-investor besar yang rata-rata dari luar negeri menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dengan investor berjalan dengan baik. Namun, dalam pelaksanaan komunikasi dengan investor ini yang lebih banyak mengambil peran dengan investor adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini BKPM karena Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) ini telah menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Komunikasi yang dilakukan pun lebih banyak dilaksanakan secara daring kecuali pada saat penandatanganan *Memorandum Of Understanding* (MOU). Sementara itu, untuk Pemerintah Kabupaten Batang, memiliki tugas dalam mendampingi investor dalam melakukan kunjungan ke Kawasan Industri Terpadu (KITB) dan juga melakukan verifikasi data yang dikirim oleh investor dengan kondisi nyata di lapangan.

B. Sumberdaya

Sumberdaya menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan, sumberdaya yang berkompeten dan baik akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang baik. Sumberdaya yang dimaksud disini yaitu kualitas sumberdaya manusia yang menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan sebuah kebijakan yang ada, didukung dengan sumberdaya pendukung berupa sarana prasarana yang dapat membantu pekerjaan manusia tersebut.

Sumberdaya pendukung berupa sarana prasarana yang baik yang akan dapat membuat Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) akan lebih dipilih oleh investor asing untuk membuat perusahaannya di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sehingga dengan banyaknya perusahaan yang masuk akan memperkuat ekonomi negara dan juga Kabupaten Batang. Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) ini didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Dimulai dari adanya PLTU 1000 MW yang merupakan salah satu PLTU terbesar di Indonesia. Lalu, ditambah dengan adanya 3 jalur transportasi utama di pulau Jawa yang dapat mendukung kegiatan industri di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Selain itu, letak Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) juga dekat dengan Bandara Internasional Ahmad Yani dan juga pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang menjadi jalur keluar masuknya orang maupun barang di Jawa Tengah yang mana hanya membutuhkan satu jam menggunakan kendaraan bermotor dari lokasi Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Terlebih lagi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) akan dibangun *Dry Port* yang akan lebih mempercepat keluar masuknya barang di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang mengangkat konsep "*Smart & Sustainable Industrial Estate*" ini juga didukung oleh jaringan 5G guna menunjang konsep tersebut. Penyediaan jaringan ini menjadi sangat penting pada zaman sekarang ini yang serba online. pembangunan juga memperhatikan aspek lingkungan di mana di dalam Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dengan dibangunnya TPST (Tempat Pengolahan Kawasan Terpadu) Kawasan. TPST Kawasan ini merupakan tempat Pengolahan sampah yang dikelola oleh pengelola dengan melakukan pemisahan sampah anorganik maupun organik yang terpusat berdasarkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang tentunya menunjang dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan.

Pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dapat dinilai berhasil dan mampu membantu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Batang salah satunya jika masyarakat di Kabupaten Batang terlibat sebagai tenaga kerja karena dengan mereka menjadi tenaga kerja kehidupan mereka menjadi terjamin dan angka kemiskinan dan pengangguran pun turun. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang tentunya harus menunjukkan sikap dengan membuat aturan yang tegas terkait pekerja di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Jika tidak, maka sebagian besar tenaga kerja akan dikuasai oleh tenaga kerja dari luar daerah maupun dari luar negeri. fokus Pemerintah Kabupaten Batang dalam mempersiapkan masyarakat Kabupaten Batang tidak hanya berfokus untuk menjadikan masyarakat sebagai pekerja di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), akan tetapi lebih dari itu, Pemerintah Kabupaten Batang menginginkan masyarakat Kabupaten Batang juga membuka usaha di sekitar lokasi KITB karena usaha-usaha inilah yang paling berkembang dalam memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat maupun bagi Kabupaten Batang. Usaha-usaha yang dibuka adalah usaha pendukung bagi perusahaan-perusahaan besar yang ada di dalam Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Sumberdaya aparatur pemerintah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang sudah memadai. Memadai yang dimaksud disini adalah memadai dalam hal jumlah dan juga kompetensi yang dimilikinya. Menurut data BPS Kabupaten Batang Tahun 2021, Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang terdiri dari 6.254 orang PNS, terdiri dari 2.901 pegawai laki-laki dan 3.353 pegawai perempuan. Bila dilihat menurut kelompok umur terdapat 2.811 pegawai berumur lebih dari 50 tahun, 1.479 orang diantara pegawai tersebut berusia 55 tahun ke atas yang beberapa tahun lagi mendekati masa purna bakti atau pensiun. Jumlah Pegawai Negeri Sipil secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Batang Menurut Jabatan

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Fungsional tertentu	1.384	2.496	4.378
Fungsional Umum	1.163	654	1.319
Struktural	354	203	557
Eselon I	-	-	-
Eselon II	25	3	28
Eselon III	97	38	135
Eselon IV	232	162	394
Eselon V	-	-	-
Jumlah	2020	2.901	3.353
	2019	3.196	3.451

Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Batang Tahun 2021

Sumberdaya aparatur yang memadai ini mampu membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan yang ada. Termasuk dalam kebijakan pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

C. Disposisi

Disposisi menjadi menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan karena disposisi sendiri merupakan keinginan, kecenderungan, dan kemauan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang ada. Disposisi ini melihat kesungguh sungguh/niat dari para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai. Dalam hal pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) ini, Pemerintah Kabupaten Batang benar-benar memilih orang-orang terbaik dalam pengelolaannya ini. orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang mau bekerja secara maksimal karena Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) ini merupakan proyek nasional yang akan mendatangkan banyak pemasukan bagi Kabupaten Batang. Dalam pengelolaan Kawasan Industri terpadu Batang (KITB) Pemerintah Kabupaten Batang benar-benar mempersiapkan dengan baik, seperti dalam melakukan verifikasi data yang dikirimkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Batang membuat tim khusus yang dibentuk melalui SK Bupati Nomor 751/384/2020 tentang Tim Pemeriksaan Lapangan Kawasan Industri Kabupaten Batang yang bertugas untuk memverifikasi data yang dengan kondisi di lapangan.

Sementara itu, terkait dengan tingkat pendidikan tenaga kerja, Menurut data BPS Kabupaten Batang Tahun 2021, Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang terdiri dari 6.254 orang PNS, terdiri dari 2.901 pegawai laki-laki dan 3.353 pegawai perempuan. Bila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai negeri sipil yang memiliki pendidikan S1 ke atas mencapai 67,52 persen. Nilai ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai 67,00 persen. Bila dilihat menurut kelompok umur terdapat 2.811 pegawai berumur lebih dari 50 tahun, 1.479 orang diantara pegawai tersebut berusia 55 tahun ke atas yang beberapa tahun lagi mendekati masa purna bakti atau pensiun. Selama tahun 2020, Badan Kepegawaian Daerah mengadakan 6 diklat /pelatihan/bimbingan teknis yang diikuti oleh 53 orang pegawai. Secara rinci, jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Batang
Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)
Sampai Dengan SD		68	7	75
SMP/Sederajat		94	52	146
SMA/Sederajat		485	256	741
Diploma I,II		60	51	111
Diploma III		168	790	958
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D		2.026	2.197	4.223
Jumlah Total	2020	2.901	3.353	6.254
	2019	3.196	3.451	6.647

Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Batang, 2021.

Jika melihat data tersebut, sebageaian besar pegawai di Pemerintahan Kabupaten Batang memiliki pendidikan yang tinggi yaitu setara S1 ke atas yang tentunya hal itu menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan penafsiran kebijakan bagi para pegawai di Kabupaten Batang cukup tinggi. Dari observasi yang telah dilakukan, para pelaksana kebijakan di ketiga instansi yaitu Bappelitbang, DPMPTSP dan Disperindagkop Kabupaten Batang ini memiliki kemauan yang tinggi dalam mesukseskan kebijakan pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) ini agar dapat memajukan perekonomian di Kabupaten Batang. Oleh karena itu, progress dalam pembangunan Kawasan Industri Terpadu dapat berjalan dengan lancar. Satu kekurangan yang dimiliki oleh pegawai Kabupaten Batang adalah kemampuan Bahasa Inggris yang masih rendah.

Bukti keseriusan dalam menyambut datangnya KITB oleh Pemerintah Kabupaten Batang adalah Pemerintah Kabupaten Batang telah menyiapkan kawasan-kawasan penyangga di sekitar lokasi pembangunan kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Para pelaksana kebijakan ini memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk mulai berpikir membuat suatu usaha yang dapat mensupport KITB sehingga masyarakat pun dapat merasakan dampak ekonomi dari KITB ini dan juga dapat lebih menggerakkan perekonomian di Kabupaten Batang. Selain itu, bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Batang dalam menyambut KITB ini dapat dilihat ketika Pemerintah Kabupaten Batang mengadakan pelatihan kepada warga untuk meningkatkan keterampilan dan jiwa usahanya agar mampu masuk sebagai karyawan di KITB maupun membuka usaha di sekitaran lokasi KITB.

D. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi menjadi sebuah hal yang penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Struktur birokrasi ini menjadi sebuah aturan yang memberikan kejelasan pembagian tugas bagi setiap bagian yang terlibat. Struktur birokrasi juga memberikan kejelasan kewenangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar bagian maupun antar instansi terkait pelaksanakebijakan. Dengan adanya kejelasan kewenangan maka akan terjadi keselarasan dalam pelaksanaan tugas sehingga akan memperlancar jalannya kebijakan dan mempercepat pencapaian tujuan kebijakan yang ada. Pada kebijakan pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) ini struktur birokrasi yang baik sangatlah diperlukan karena Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga dalam pengelolaannya memerlukan pembagian tugas dan kewenangan yang baik antar pemerintah pusat, pemeritah provinsi dan juga pemerintah kabupaten itu

sendiri. Pembagian ini sangat diperlukan agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tugasnya.

Jika dilihat progress pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KITB) yang begitu pesat menunjukkan bahwa masing-masing instansi dapat bekerja dengan baik sesuai tugasnya. Dalam hal pengelolaan KITB ini, pemerintah pusat menjadi pemegang kebijakan yang menentukan arah kebijakan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) serta menjadi instansi yang bertugas untuk menarik investor agar mau berinvestasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Jika dilihat dari struktur birokrasi di Pemerintah Kabupaten Batang, pengelolaan Kawasan Industri Terpadu ini dipegang oleh 3 instansi utama yaitu Bappelitbang, DPMPTSP, dan Disperindagkop Kabupaten Batang di mana ketiga instansi tersebut dikoordinir oleh Bupati Batang secara langsung karena Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) ini merupakan proyek strategis yang dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Batang.

Dalam alur birokrasi pengelolaan di Kabupaten Batang ini, dimulai dari Bupati menerima perintah tugas mengenai Kawasan Industri Terpadu Batang ini yang kemudian diteruskan ke instansi terkait, seperti perizinan jika Bupati telah menerima perintah dari pusat tentang perizinan kemudian Bupati memerintahkan DPMPTSP dan Disperindagkop dalam mengurus perizinan dan mengecek kesesuaian data yang ada. Dalam hal adanya kunjungan baik dari pemerintah pusat maupun dari investor yang akan berinventasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) maka Bupati akan mengajak Bappelitbang, DPMPTSP, dan juga Disperindagkop untuk mempersiapkan kunjungan dan paparan terkait kondisi terkini progress pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang. Ketiga instansi tersebutlah yang berwenang dalam memanfaatkan sarana prasarana yang maksimal guna pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Kemampuan yang dimiliki para aparatur sipil negara dalam menerjemahkan kebijakan kawasan industri sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan kawasan industri. Dalam hal kemampuan para aparatur sipil negara dari ketiga instansi tersebut sudah memadai dalam menyambut pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

3.2. Strategi Pemerintah Kabupaten Batang Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah

Peneliti merumuskan strategi pengelolaan dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dengan merumuskan strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT dengan menggunakan matriks SWOT sebagai berikut :

Tabel 3.4

Matriks SWOT Kawasan Industri Terpadu Batang

Internal	Strength (Kekuatan) a. Lokasi KITB terletak pada 3 jalur utama transportasi di pulau jawa. b. Jumlah dan pendidikan aparatur pemerintah Kabupaten Batang yang memadai. c. Sarana dan Prasarana yang lengkap. d. Ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.	Weakness (Kelemahan) a. Adanya potensi banjir akibat alih lahan perkebunan. b. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Batang masih minim. c. Kemampuan komunikasi Bahasa Inggris Aparatur Pemerintah yang masih kurang.
Eksternal	Strategi S-O a. Bekerjasama dengan pihak luar terkait penyediaan maupun penambahan infrastruktur	Strategi W-O a. Bekerjasama dengan pihak luar dalam membangun saluran air yang baik.
Opportunities (Peluang) a. Dukungan dari pihak luar untuk		

<p>penyediaan infrastruktur.</p> <p>b. Pembukaan lapangan kerja baru yang begitu banyak.</p> <p>c. Terbukanya peluang usaha-usaha baru di sekitar lokasi KITB.</p> <p>d. Adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	<p>b. Pemerintah Kabupaten Batang perlu mengadakan pelatihan</p> <p>c. Pemerintah perlu membangun fasilitas pendukung usaha baru.</p> <p>d. Pemerintah Kabupaten Batang perlu bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk membuat peraturan terkait keharusan perusahaan untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi</p>	<p>b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar dapat membuat peraturan terkait lapangan kerja baru yang dibuka oleh perusahaan di KITB.</p> <p>c. Pemerintah Kabupaten Batang perlu membuat pertemuan dengan pihak investor asing agar mampu mengasah kemampuan berbahasa inggris aparatur pemerintah Kabupaten Batang</p>
<p>Threat (Ancaman)</p> <p>a. Minimnya kesadaran pemahaman masyarakat Kabupaten Batang akan kehadiran KITB.</p> <p>b. Kedatangan tenaga kerja dari luar daerah.</p> <p>c. Munculnya orang luar daerah yang ingin membuka usaha di sekitar lokasi KITB</p> <p>d. Dapat menyebabkan munculnya kesenjangan dan kawasan kumuh di sekitar lokasi KITB.</p>	<p>Strategi S-T</p> <p>a. Pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa KITB ini berada pada lokasi yang strategis</p> <p>b. Pemerintah perlu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan skill dan kompetensi warga.</p> <p>c. Pemerintah perlu mengembangkan kawasan penyangga di sekitar lokasi KITB.</p> <p>d. Pemerintah Kabupaten Batang juga perlu membangun daerah di sekitar KITB agar tidak terjadi ketimpangan.</p>	<p>Strategi W-T</p> <p>a. Pemerintah Kabupaten Batang perlu juga membangun kawasan di sekitar sesuai dengan tata kelola lingkungan yang baik.</p> <p>b. Membuat peraturan terkait penggunaan tenaga kerja lokal dan pembatasan tenaga kerja dari luar daerah.</p> <p>c. Memberikan pelatihan kemampuan berbahasa inggris kepada aparatur pemerintahan.</p>

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2022.

Berdasarkan hasil analisis matriks SWOT di atas, diperoleh strategi dalam pengelolaan kawasan Industri Terpadu Batang sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan pihak luar terkait penyediaan maupun penambahan infrastruktur di 3 jalur transportasi utama tersebut. Hal ini untuk memudahkan mobilisasi kegiatan KITB.
2. Pemerintah Kabupaten Batang perlu mengadakan pelatihan. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan skill dan kompetensi agar mampu bersaing untuk bekerja di KITB.
3. Pemerintah perlu membangun fasilitas pendukung usaha baru, seperti ruko dan fasilitas lainnya, strategi ini akan mendorong masyarakat untuk membuka usaha di sekitar lokasi KITB karena masyarakat merasa terbantu dengan adanya fasilitas pendukung tersebut.
4. Pemerintah Kabupaten Batang perlu bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk membuat peraturan terkait keharusan perusahaan untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Bekerjasama dengan pihak luar dalam membangun saluran air yang baik. Hal ini bertujuan untuk menghindari banjir yang disebabkan dari alih fungsi lahan perkebunan.
6. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar dapat membuat peraturan terkait lapangan kerja baru yang dibuka oleh perusahaan di KITB.
7. Pemerintah Kabupaten Batang perlu membuat pertemuan dengan pihak investor asing agar mampu meningkatkan kemampuan berbahasa inggris aparatur pemerintah Kabupaten Batang.
8. Pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa KITB ini berada pada lokasi yang strategis sehingga daerah di sekitarnya harus bisa memanfaatkan dengan baik sehingga daerah tersebut memiliki peran untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
9. Pemerintah perlu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan skill dan kompetensi warga. Pelatihan ini bertujuan agar masyarakat sekitar lokasi KITB juga bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.
10. Pemerintah perlu mengembangkan kawasan penyangga yang dapat membuka usaha baru untuk mendukung kegiatan industri di KITB. Kawasan penyangga ini perlu dibangun dengan mendirikan usaha-usaha yang mampu mendukung kegiatan industri di KITB sehingga kawasan penyangga maupun KITB dapat saling menguntungkan
11. Pemerintah Kabupaten Batang juga perlu membangun daerah di sekitar KITB agar tidak terjadi ketimpangan. Hal ini sangat diperlukan, karena pada daerah-daerah lain, pembangunan hanya dilakukan di kawasan industri baru atau kawasan elite baru sehingga kawasan lama yang ada di sekitarnya menjaditerlupakan dan menjadi tertinggal. Oleh karena itu, sbelum itu terjadi perlu dipersiapkan dari awal terlebih dahulu.
12. Pemerintah Kabupaten Batang perlu juga membangun kawasan di sekitar sesuai dengan tata kelola lingkungan yang baik. Pembangunan dengan tata kelola yang baik ini perlu agar tidak terjadi bencana alam yang diakibatkan ketidakstabilan kondisi lingkungan.
13. Membuat peraturan terkait penggunaan tenaga kerja lokal dan pembatasan tenaga kerja dari luar daerah. Pembatasan tenaga kerja dari luar daerah ini diperlukan agar mampu untuk membantu masyarakat sekitar lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan di KITB.

Memberikan pelatihan kemampuan berbahasa inggris kepada aparatur pemerintahan. Pemberian pelatihan ini bertujuan agar aparatur pemerintah mampu melakukan komunikasi yang baik dengan investor agar mereka dapat ikut melakukan pembangunan di lokasi sekitar

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) ini merupakan sebuah peluang dalam memajukan perekonomian Kabupaten Batang jika mampu dikelola dengan baik ke depannya. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) pada tahap awal ini diemukan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik tetapi belum optimal dikarenakan dalam proses pembangunan ini para aparatur pemerintah Kabupaten Batang masih kurang dalam hal komunikasi menggunakan Bahasa Inggris, padahal investor-investor di Kawasan Industri Terpadu rata-rata merupakan investor asing. Selain itu, dalam kewenangan yang dimiliki masih banyak yang dipegang oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah Kabupaten Batang belum dapat membuat kebijakan strategis yang dapat berpengaruh lebih ke perekonomian di Kabupaten Batang.

Dalam komunikasi berbahasa Inggris, pemerintah Batang sudah seharusnya untuk menambah kemampuan berbahasa Inggris bagi aparatur pemerintah agar komunikasi dengan investor dapat lebih berjalan dengan baik karena jika komunikasi dengan investor bias berjalan dengan baik maka akan lebih memudahkan pemerintah Kabupaten Batang membuat kesepakatan dengan investor yang dapat membantu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Batang. Selanjutnya, terkait dengan kewenangan, sudah seharusnya pemerintah Kabupaten Batang melakukan lobby dengan Pemerintah pusat dengan baik dan juga harus mampu menyiapkan strategi-strategi yang strategis yang mampu mendorong kebermanfaatannya bagi Kabupaten Batang khususnya dalam bidang perekonomian. Pendekatan dengan pemerintah pusat ini penting mengingat dalam pengambilan kebijakan masih banyak dipegang oleh pusat sehingga agar lebih memberikan manfaat bagi Kabupaten Batang, tentunya diperlukan lobby yang baik agar ada pembagian pemasukan yang lebih ke Kabupaten Batang.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Batang juga perlu melakukan kajian-kajian yang strategis dengan para ahli agar mampu mempersiapkan strategi terbaik untuk memanfaatkan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) untuk meningkatkan perekonomian. Pemerintah Kabupaten Batang juga perlu melakukan pelatihan terkait skill dan juga pelatihan berwirausaha untuk menciptakan tenaga kerja yang berkompeten dari masyarakat Batang dan juga mempersiapkan masyarakat Kabupaten Batang untuk membuka usaha yang mampu mendukung keberadaan KITB ini agar masyarakat Kabupaten Batang tidak hanya menjadi penonton saja.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar dikarenakan belum ada penelitian yang mengambil tempat di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) ini karena ini merupakan proyek baru sehingga yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan temuan-temuan baru terkait dengan Implementasi Kebijakan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan yang telah peneliti lakukan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Batang peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Batang telah berjalan dengan baik, akan tetapi belum optimal dikarenakan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Hal ini berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan menggunakan teori Edward III, yang memiliki dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. 2 dari 4 dimensi telah berjalan dengan optimal sementara untuk yang 2 lainnya kurang optimal dikarenakan komunikasi dengan investor yang masih terhambat disebabkan kurangnya kemampuan berbahasa Inggris para aparatur pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dan juga berkaitan

dimensi Struktur Birokrasi tentang kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Batang masih minim dikarenakan ini Proyek Strategis Progress maka lebih banyak dipegang oleh pusat sehingga Pemerintah Kabupaten Batang kurang dapat mengelola secara penuh karena kewenangan terbatas.

Keterbatasan Penelitian Penelitian yang peneliti lakukan memiliki keterbatasan yaitu dalam hal waktu di mana waktu penelitian yang dimiliki peneliti hanya 2 minggu saja dan juga belum dapat menjangkau ke segala aspek secara keseluruhan mengingat KITB ini juga merupakan Proyek Strategis Nasional.

Arah Masa Depan Penelitian. Mengingat KITB ini merupakan proyek baru yang menjadi Proyek Strategis Nasional sehingga memerlukan penelitian lanjutan agar memperoleh hasil yang lebih baik terlebih terkait dengan strategi dalam peningkatan ekonomi bagi Kabupaten Batang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, Kepala DPMPTSP Kabupaten Batang, Kepala BAPPELITBANG Kabupaten Batang, dan Kepala Disperindagkop Kabupaten Batang serta seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Jacqueline, Stavros, Cooperider David, and Kelly D. Lynn. "Strategic Inquiry, Appreciative Intent : Inspiration SOAR. A New Framework for Strategic Planning." *Journal Ai Practitioner* November (2003): 1–21.

Lestari, Santi Endah, Agus Suryono, and Tjahjanulin Domai. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Ksct) Di Kabupaten Pacitan." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 2, no. 1 (2018): 10.

Mustofa. (2020). *Produk Domestic Bruto Kabupaten Batang Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Batang: Badan Pusat Statistika Kabupaten Batang, 2020.

Noer, Justiar, Khasan Effendy, Ngadisah, and Sampara Lukman. "Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tukak Sadai" 2, no. 3 (2019): 190–202.

Putranto, Andi Tri, Agustinus Pati, and Alfon Kimbal. "Implementasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung" 1, no. 1 (2019): 21–26.

Rizalsan, Alvin, and Vishnu Juwono. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang." *Jurnal Borneo Administrator* 16, no. 2 (2020).

Syahrudin. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 17, no. 1 (2010): 31–42.

Yuliani, Dini, Irfan Nursetiawan, and Andhika Siregar. "Evaluation of The Policy Implementation of Industrial Zone." *International Journal of Kybernology* 5, no. 2 (2020): 332–340. <http://ejournal.ipdn.ac.id/IJOK/article/view/1431/880>.

